

## ANALYSIS OF THE IMPACT OF VILLAGE OFFICIALS' COMPETENCE, ORGANIZATIONAL COMMITMENT, AND COMMUNITY PARTICIPATION ON ACCOUNTABILITY IN THE USE OF VILLAGE FUNDS IN WAROPEN DISTRICT

## ANALISIS DAMPAK KOMPETENSI APARAT KAMPUNG, KOMITMEN ORGANISASI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG DI KABUPATEN WAROPEN

**Korinus Reri**

Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ottow & Geissler Serui

E-mail: [korinusreri70@gmail.com](mailto:korinusreri70@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Correspondent

**Korinus Reri**

[korinusreri70@gmail.com](mailto:korinusreri70@gmail.com)

#### Key words:

**Competence, Organizational Commitment, Community Participation and Accountability**

#### Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

page: 049 – 067

### ABSTRACT

This study aims to examine how much influence the competence, organizational commitment and community participation on village fund management accountability in Waropen Regency. The variables used are the Village Apparatus Competency, Village Government Organizational Commitment and Community Participation, as an independent variable, while Village Fund Management Accountability is the dependent variable. The study was conducted in 10 (ten) Districts in Waropen Regency. The results showed that in partial hypothesis testing (t test), the independent variable competence of village financial management apparatus (X1), and the commitment of village government organizations (X2), did not have a positive effect on the dependent variable of village fund management accountability (Y), while the variable community participation (X3) positively influences the accountability of village fund management (Y). Simultaneous hypothesis testing (Test F), shows that the competence of village financial management apparatus (X1), the commitment of village government organizations (X2), and community participation (X3) together positively influence the accountability of village fund management (Y).

Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p><b>Koresponden</b></p> <p><b>Korinus Reri</b> korinusreri70@gmail.com</p> <p><b>Kata kunci:</b></p> <p><b>Kompetensi, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas</b></p> <p><b>Website:</b> <a href="https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER">https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</a></p> <p><b>hal: 049 – 067</b></p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh kompetensi, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung di Kabupaten Waropen. Variabel yang digunakan yaitu Kompetensi Aparat Kampung, Komitmen Organisasi Pemerintah Kampung dan Partisipasi Masyarakat, sebagai variabel independen, sedangkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung sebagai variabel dependen. Penelitian dilakukan pada 10 (sepuluh) Distrik di Kabupaten Waropen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengujian hipotesis secara parsial (uji t), variabel independen kompetensi aparat pengelola keuangan kampung (X1), dan komitmen organisasi pemerintah kampung (X2), tidak berpengaruh positif terhadap variabel dependen akuntabilitas pengelolaan dana kampung (Y), sedangkan variabel partisipasi masyarakat (X3) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung (Y). Pengujian hipotesis secara simultan (Uji F), menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola keuangan kampung (X1), komitmen organisasi pemerintah kampung (X2), dan partisipasi masyarakat (X3) secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung (Y).</p> <p style="text-align: right;"><i>Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.</i></p>

## PENDAHULUAN

Desentralisasi adalah wewenang pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam berbagai aspek, yaitu desentralisasi politik (demokrasi), desentralisasi administratif (dekonsentrasi), dan desentralisasi fiskal (Francis & James, 2003). Menurut Nadir dalam Sarifudin Mada, dkk. (2017). Desentralisasi memberikan ruang gerak bagi pemerintah di tingkat bawah untuk mengurus wilayahnya masing-masing sesuai wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya. Dengan demikian, tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada seluruh lapisan masyarakat di tingkat bawah dapat dilaksanakan.

Salah satu bentuk desentralisasi yang sedang dilaksanakan saat ini adalah pelimpahan kewenangan kepada pemerintah desa. Kebijakan pemerintah pemerintah pusat melimpahkan kewenangan kepada desa secara otonom adalah untuk meletakkan fondasi pembangunan yang dimulai dari tingkat desa. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjawab persoalan kemiskinan dan kerentanan akibat dari kesenjangan pembangunan yang telah dilakukan (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, (2015).

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Selanjutnya dijelaskan bahwa Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat dimana penyebutan namanya disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

Berdasarkan data pada Kementerian Keuangan RI (Nota Keuangan), jumlah dana desa yang telah dianggarkan secara nasional melalui APBN sejak tahun 2015 sampai 2022, telah mencapai Rp. 468,9 Triliun, dengan rincian sebagai berikut : pada tahun 2015 sebesar Rp.20,77 Triliun, tahun 2016 sebesar Rp.46,98 Triliun, tahun 2017 sebesar Rp.60 Triliun, tahun 2018 sebesar Rp. 60 Trilyun, tahun 2019 sebesar Rp. 70 Triliun, tahun 2020 sebesar Rp. 72 Triliun, tahun 2021 sebesar 72 Triliun dan tahun 2022 sebesar Rp. 68 Triliun. Momentum dana desa diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Secara khusus dana desa diharapkan dapat mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa, dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa pada tahun 2019.

Fakta menunjukkan bahwa pada tahun 2015 jumlah desa mandiri sebanyak 3.608 dari 73.709 atau 4,89% dan jumlah desa tertinggal sebanyak 33.592 dari 73.709 atau 45,57%. (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2015 dalam Sarifudin Mada, dkk. 2017). Fakta dan data tersebut telah mengalami perubahan yang sangat signifikan pada tahun 2022, bahwa dari 73.954 desa yang ada di Indonesia saat ini, sebanyak 20.245 desa telah masuk dalam kategori desa maju, 6.238 desa masuk kategori desa mandiri, 33.881 desa termasuk kategori desa berkembang, 9.221 desa masuk kategori desa tertinggal, dan masih ada 4.365 desa yang masuk dalam kategori desa sangat tertinggal. (Sumber: Laporan Indeks Desa Membangun (IDM), Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Tahun 2022)

Kebijakan alokasi anggaran ini memiliki konsekuensi terhadap pengelolaanya yang seharusnya dilaksanakan secara professional, efektif, efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Alokasi APBN yang sebesar 10% tersebut di atas, telah menyebabkan penerimaan Desa meningkat, sehingga diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban yang baik dan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Permendagri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Pendapatan Desa sebagaimana yang diatur dalam Permendagri 113 tahun 2014 (pasal 9, 10) adalah sebagai berikut: Pendapatan Desa, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Desa (PADes);
- b. Transfer; dan
- c. Pendapatan Lain-Lain.

Kelompok PADes, terdiri atas jenis Hasil Usaha Desa; Hasil Aset Desa; Hasil swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Desa; serta Lain-lain Pendapatan Asli Desa. Kelompok Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis : a) Dana Desa; b). Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah; c). Alokasi Dana Desa (ADD); d). Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan e). Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada asal 9 ayat (2) huruf (c), terdiri atas jenis: a). Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan b). Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, penyebutan Pemerintahan Desa atau Desa Adat sebagaimana tercantum dalam UU 6 Tahun 2014 tentang Desa, diganti dengan sebutan Pemerintahan Kampung, berdasarkan legitimasi yang diatur dalam UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Oleh sebab itu terkait dengan semua bentuk program maupun alokasi keuangan yang menjadikan desa-desa di Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai sasaran kegiatan, harus menyesuaikan penyebutan Desa menjadi Kampung. Sehubungan dengan hal tersebut maka sebutan Keuangan Desa sebagaimana termuat dalam Permendagri 113 tahun 2014 juga disesuaikan menjadi Keuangan Kampung.

Waropen merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Papua yang juga mendapatkan pengalokasian Dana Kampung dari Pemerintah Pusat sejak tahun 2016. Berdasarkan daftar Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, bahwa total dana kampung untuk Kabupaten Waropen yang ditetapkan dalam APBN dan disalurkan melalui Pemerintah Daerah, pada tahun 2020 - 2022, sebesar Rp. 294.924.492.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar, Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta, Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), terdiri dari alokasi tahun 2020 sebesar Rp. 105.325.071.000,-, alokasi tahun 2021 sebesar Rp. 105.104.213.000,- dan alokasi tahun 2022 sebesar Rp. 84.495.208.000,-.

Seperti permasalahan umum dalam penggunaan dan pertanggung jawaban Dana Desa seperti yang diungkapkan oleh Kementerian Keuangan RI, (2016:19) dalam Sarifudin Mada, dkk. (2017), pengelolaan Dana Kampung di Kabupaten Waropen pun mengalami permasalahan yang hampir sama, antara lain seperti yang diuraikan dalam tabel berikut :

- 1) Penggunaan dana di luar bidang prioritas, penyebabnya adalah Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), sering kali tidak mengakomodir kebutuhan utama di kampung, aspek yang perlu mendapat perhatian dalam masalah ini adalah perencanaan dan penganggaran.
- 2) Belanja kegiatan dan Pelaporan dana tidak sesuai dengan APBK, penyebabnya APBK tidak tersusun secara sistematis, aspek yang perlu diperhatikan adalah ketaatan, pengawasan dan kompetensi aparat pengelola dana.
- 3) Laporan keuangan dan laporan realisasi tidak didukung dengan bukti belanja dan dokumentasi yang lengkap dan tidak sesuai dengan format pelaporan, penyebabnya adalah pengelola keuangan kampung belum memiliki pemahaman administrasi keuangan yang baik, aspek yang

menjadi perhatian adalah administrasi, pengawasan dan kompetensi.

- 4) Pekerjaan pengadaan barang dan jasa seluruhnya dikerjakan oleh pihak ketiga/penyedia jasa, penyebabnya adalah alasan kemudahan pengelolaan dan kepastian pencapaian target, aspek yang harus diperhatikan yaitu tingkat partisipasi masyarakat.
- 5) Dana tidak tersimpan di dalam rekening kas kampung, penyebabnya adalah ada rekening penampung sementara, karena semua dana harus dikeluarkan pada akhir tahun, aspek yang perlu menjadi perhatian yaitu administrasi, pengawasan, dan ketaatan.
- 6) Adanya kelompok masyarakat kampung yang apatis karena merasa tidak dilibatkan dalam tahapan pengelolaan dana kampung, penyebabnya adalah konflik internal di kampung karena kecemburuan sosial ataupun karena manajemen pemerintahan di kampung yang belum efektif, aspek yang harus menjadi perhatian adalah kepemimpinan, partisipasi masyarakat dan transparansi. (Sumber: Dinas Pemberdayaan Kampung dan BPKAD Kab. Waropen, tahun 2022).

Dengan demikian, maka diduga bahwa permasalahan akuntabilitas pengelolaan dana kampung di Kabupaten Waropen diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain: rendahnya kompetensi aparat kampung; lemahnya komitmen organisasi pemerintah kampung dan kurangnya partisipasi masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada 10 (sepuluh) distrik dari 12 (dua belas) distrik yang berada di Kabupaten Waropen, khususnya pada kampung-kampung yang mengelola Program Dana Kampung yang bersumber dari transfer APBN ke Daerah untuk membiayai Program Dana Desa Tahun Anggaran 2020 - 2022. Lokasi penelitian ini pada kampung-kampung di wilayah distrik yang terletak pada pesisir pantai saja, karena sulitnya jangkauan transportasi untuk melakukan pengambilan data pada 2 (dua) distrik yang terletak di wilayah pegunungan. Distrik dan kampung yang ditentukan menjadi lokasi penelitian, yaitu :

- |    |                       |                                               |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | Distrik Wapoga        | : Kampung Awera, Pirare dan Yermiki           |
| 2  | Distrik Inggerus      | : Kampung Demisa, Harapan Jaya dan Awaso      |
| 3  | Distrik Oudate        | : Kampung Botawa, Baino Jata dan Ruambak Jaya |
| 4  | Distrik Waropen Bawah | : Kampung Sarafambai, Waren I dan Uri         |
| 5  | Distrik Urei Faisei   | : Kampung Urei Faisei III, Paradoi dan Ghoyui |
| 6  | Distrik Soyoi Mambai  | : Kampung Daimboa, Fafarui, dan Mambai        |
| 7  | Distrik Risei Sayati  | : Kampung Wobari, Mui, dan Fafado             |
| 8  | Distrik Wonti         | : Kampung Sifuisera, Wanda dan Odase          |
| 9  | Distrik Demba         | : Kampung Mayaghaido, Fafai dan Aniboi        |
| 10 | Distrik Masirei       | : Kampung Sauri, Bunggu dan Sinonde.          |

### **Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan orang, kejadian atau hal minat yang ingin diinvestigasi oleh peneliti (Nainggolan, 2015). Menurut Cooper populasi adalah

total kumpulan elemen atau unsur yang kita harapkan membuat kesimpulan. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah 112 kampung definitif yang berada pada 12 (dua belas) distrik di wilayah Pemerintahan Kabupaten Waropen. Sampel adalah sebagian dari populasi atau sejumlah anggota yang dipilih dari populasi (Nainggolan H, 2015).

Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 30 (tiga puluh) kampung, dengan penyebaran, 3 (tiga) kampung pada setiap distrik. dan setiap kampung ditentukan 6 (enam) responden, maka total seluruh responden yang dilibatkan adalah 180 (seratus delapan puluh) orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *non probability sampling* yaitu dengan menggunakan teknik *purposive*, karena penentuan sampel berdasarkan kriteria dan kehususan tertentu dari obyek penelitian.

Kampung-kampung yang ditentukan sebagai sampel, adalah kampung definitif yang telah mendapat kucuran dana kampung sejak tahun 2020 - 2022.

### **Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, dengan metode survei yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen untuk menghimpun data primer. Menurut Sugiyono, kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Instrumen yang digunakan untuk pengambilan data, diadopsi dari Sarifudin Mada, dkk. (2017), dengan beberapa modifikasi oleh penulis. Responden diminta kesediaan untuk menyampaikan persepsinya tentang pertanyaan - pertanyaan, dengan cara memberi tanda pada salah satu pilihan dalam kolom jawaban, yaitu : Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Ragu-ragu (R), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). Jawaban atas masing-masing item pertanyaan tersebut diukur dengan Skala Likert, dimana skor nilai paling rendah, adalah angka 1 (satu), diberikan untuk jawaban STS, sampai dengan skor nilai paling tinggi, adalah angka 5 (lima), diberikan untuk jawaban SS.

Responden yang terpilih dalam penelitian ini adalah pengelola program dana kampung pada setiap lokasi pengambilan sampel, yaitu Aparat Pemerintah Kampung, Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Kampung (PTPKK), Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) dan Tokoh-tokoh Masyarakat setempat.

### **Pengukuran Variabel**

Skala yang digunakan dalam instrumen penelitian berupa kuesione untuk mengukur dimensi dan indikator variabel independen maupun variabel dependen, adalah skala Likert, dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Variabel Kompetensi, terdiri dari 3 (tiga) dimensi penngamatan, (Edison, *et al*, 2016) antara lain :
  - a. Pengetahuan (*knowledge*), memiliki 2 (dua) indikator, yaitu: Pengetahuan, dan Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan;
  - b. Kemampuan (*skill*), memiliki 2 (dua) indikator, yaitu : Keahlian teknis, dan Kemampuan mencari solusi;
  - c. Sikap (*attitude*), memiliki 2 (dua) indikator, yaitu : Inisiatif dalam bekerja, serta Keramahan dan kesopanan;
- 2) Variabel Komitmen Organisasi, terdiri dari 3 (tiga) dimensi

pengamatan, (Porter, *et al*, 1974), antara lain :

- a. Afektif, memiliki 2 (dua) indikator, yaitu : Keyakinan terhadap tujuan organisasi dan perasaan memiliki organisasi;
  - b. Keberlanjutan, memiliki 2 (dua) indikator, yaitu : Mempertahankan keanggotaan organisasi, dan Kesetiaan dalam organisasi.
  - c. Normatif, memiliki 1(satu) indikator, yaitu : Kesiediaan mengerahkan upaya atas nama organisasi.
- 3) Variabel Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 3 (tiga) dimensi pengamatan, (Heller, *et al* dan Sujarweni, 2015), antara lain :
- a. Pengambilan keputusan, memiliki 1 (satu) indikator, yaitu : Keterlibatan dalam pengambilan keputusan program pembangunan desa.
  - b. Penyusunan anggaran, memiliki 2 (dua) indikator, yaitu : Mengusulkan rencana anggaran, dan Terlibat dalam rapat paripurna.
  - c. Pelaksanaan anggaran, memiliki 3 (tiga) indikator, yaitu : Terlibat megawasi dan melaporkan, Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran, dan Memberikan penghargaan.
- 4) Variabel Akuntabilitas, terdiri dari 2 (dua) dimensi pengamatan, (Mahmudi, 2011), antara lain :
- a. Kejujuran dan hukum, memiliki 2 (dua) indikator, yaitu : Kejujuran dan keterbukaan informasi, serta Kepatuhan dalam pelaporan.
  - b. Proses, memiliki 3 (tiga) indikator, yaitu : Kesesuaian prosedur, Kecukupan informasi, dan Ketepatan penyampaian laporan.

## **Metode Analisis Data**

### **Analisis Statistik**

Analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif terdiri dari penghitungan mean, median, serta standar deviasi maksimum dan standar deviasi minimum dari masing-masing data sampel (Nainggolan, H, 2015). Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut.

### **Uji Asumsi Klasik**

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu akan dilakukan pengujian terjadinya penyimpangan terhadap asumsi klasik. Dalam asumsi klasik terdapat beberapa pengujian yang harus dilakukan, yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolineritas, dan Uji Heteroskedastisitas.

### **Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh keeratan atau kekuatan hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu ( $0 < R^2 < 1$ ). Apabila nilai  $R^2$  kecil berarti keeratan/kekuatan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin rendah.

Dapat juga dikatakan bahwa Koefisien Determinan ( $R^2$ ) dalam regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh

variabel independen ( $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ ) secara serentak terhadap variabel dependen ( $Y$ ). Rumus koefisien determinan ( $R^2$ ) adalah sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{b_1 \sum x_1 y + b_2 \sum x_2 y + b_3 \sum x_3 y}{\sum y^2}$$

Dimana :

$R^2$  : Koefisien determinasi

$b_1, b_2, b_3$  : Koefisien regresi

$x_1, x_2, x_3$ : Variabel independen

$y$  : Variabel dependen

### Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghazali, dalam Hari Susanto, (2014), analisis regresi adalah studi tentang ketergantungan variabel terikat (dependen) dengan satu atau lebih variabel bebas (independen), dimana tujuannya untuk mengestimasi rata-rata variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas, serta mengetahui pengaruh antara variabel-variabel penelitian. Selanjutnya dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis secara statistik, dengan model analisis regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + e$$

Dimana:

$Y_i$  = Akuntabilitas pengelolaan keuangan kampung

$\beta_0$  = Koefisien regresi

$\beta_1 X_{1i}$  = Kompetensi aparat kampung

$\beta_2 X_{2i}$  = Komitmen organisasi pemerintah kampung

$\beta_3 X_{3i}$  = Partisipasi masyarakat

$e$  = Variabel gangguan/kesalahan (*disturbance/error terms*)

### Pengujian Hipotesis

#### Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen ( $X_1, X_2, X_3$ ) secara parsial berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen ( $Y$ ). Derajat Signifikan yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan ( $\alpha = 5\%$ ), maka hipotesis alternatif ( $H_0$ ), yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen dapat diterima. Analisis uji t juga dilihat dari tabel Coefficient. Selanjutnya perhitungan dalam penelitian ini menggunakan SPSS versil 5.00.

#### Uji Simultan (Uji F)

Menurut Sugiyono (2006 : 264) dalam Hari Susanto, (2014 : 64), uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Selain itu, dengan uji F ini dapat diketahui apakah model regresi linear berganda yang digunakan sudah tepat atau belum. Pengujian secara menyeluruh untuk mengetahui apakah secara sentak koefisien regresi variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. (Gujarati (2001: 90) dalam Hari Susanto, (2014 : 64) menjelaskan tentang rumusan uji F sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2 / K}{(1 - R^2)(n - k - 1)}$$



Dimana:

$R^2$  = Koefisien determinasi;

K = Jumlah variabel;

n = Jumlah sampel

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Kualitas Instrumen

#### Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah cara untuk mengukur konsistensi atau keandalan suatu kuesioner dalam mengukur variabel atau konstruk dari waktu ke waktu. Program SPSS memiliki fitur untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha. Menurut Nunnally, sebuah konstruk atau variabel dapat dianggap reliabel jika nilai Cronbach Alpha-nya lebih besar dari 0,6. Tabel 1 menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel. 1. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kompetensi Aparatur	0,793	Reliabel
Komitmen Organisasi	0,785	Reliabel
Partisipasi Masyarakat	0,908	Reliabel
Akuntabilitas	0,901	Reliabel

*Sumber : Data Olahan SPSS (2023).*

Hasil uji reliabilitas menjelaskan bahwa seluruh pertanyaan penelitian adalah reliabel. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60 (Nunnally, 1960).

#### Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk memastikan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian dapat mengungkapkan informasi yang ingin diukur. Dalam penelitian ini, analisis korelasi bivariate digunakan untuk menguji validitas, di mana setiap indikator skor dikorelasikan dengan total skor konstruk. Hasil uji SPSS menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan dalam penelitian ini valid. Informasi lebih detail dapat dilihat pada tabel yang disajikan.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Pearson Correlation	Koefisien Signifikansi	Jumlah Responden (N)	Keterangan
1	<i>Kompetensi( X1)</i>				
	Pertanyaan X1.1	0.643	0.000	180	Valid
	Pertanyaan X1.2	0.735	0.000	180	Valid
	Pertanyaan X1.3	0.604	0.000	180	Valid
	Pertanyaan X1.4	0.645	0.000	180	Valid
	Pertanyaan X1.5	0.678	0.000	180	Valid
2	<i>Komitmen Organisasi (X2)</i>				
	Pertanyaan X2.1	0.849	0.000	180	Valid
	Pertanyaan X2.2	0.886	0.000	180	Valid
	Pertanyaan X2.3	0.756	0.000	180	Valid

	Pertanyaan X2.4	0.629	0.000	180	Valid
3	<i>Partisipasi Masyarakat (X3)</i>				
	Pertanyaan X3.1	0.741	0.000	180	Valid
	Pertanyaan X3.2	0.612	0.000	180	Valid
	Pertanyaan X3.3	0.776	0.000	180	Valid
	Pertanyaan X3.4	0.771	0.000	180	Valid
	Pertanyaan X3.5	0.825	0.000	180	Valid
	Pertanyaan X3.6	0.401	0.000	180	Valid
	Pertanyaan X3.7	0.795	0.000	180	Valid
	Pertanyaan X3.8	0.789	0.000	180	Valid
	Pertanyaan X3.9	0.833	0.000	180	Valid
	Pertanyaan X3.10	0.802	0.000	180	Valid
4	<i>Akuntabilitas (Y)</i>				
	Pertanyaan Y1	0.803	0.000	180	Valid
	Pertanyaan Y2	0.768	0.000	180	Valid
	Pertanyaan Y3	0.788	0.000	180	Valid
	Pertanyaan Y4	0.790	0.000	180	Valid
	Pertanyaan Y5	0.526	0.000	180	Valid
	Pertanyaan Y6	0.678	0.000	180	Valid
	Pertanyaan Y7	0.824	0.000	180	Valid
	Pertanyaan Y8	0.799	0.000	180	Valid
	Pertanyaan Y9	0.754	0.000	180	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS (2023).

Hasil uji validitas terhadap pertanyaan-pertanyaan pada empat variable penelitian, yaitu Kompetensi (X1), Komitmen Organisasi (X2), Partisipasi Masyarakat (X3) dan Akuntabilitas (Y), menunjukkan bahwa nilai Pearson Correlation 0.00 lebih kecil dari nilai signifikansi, yaitu 0,05, maka semua pertanyaan pada variable-variabel tersebut dinyatakan valid.

### Hasil Analisis Data

#### Statistik Deskriptif

Tabel 3 menyajikan hasil statistik deskriptif yang menunjukkan rata-rata atau mean dan standar deviasi dari variabel akuntabilitas sebagai variable dependen, serta variabel independen seperti kompetensi, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat. Ini memberikan gambaran tentang sebaran data dalam penelitian ini.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Variabel	Jumlah Responden	Skor Penilaian Responden Terendah	Skor Penilaian Responden Tertinggi	Mean	Standart Deviasi
Akuntabilitas	180	27	44	36,1389	4,43511
Kompetensi	180	10	25	21,4000	2,44172
Komitmen Organisasi	180	11	20	16,7222	2,2291

Variabel	Jumlah Responden	Skor Penilaian Responden Terendah	Skor Penilaian Responden Tertinggi	Mean	Standart Deviasi
Partisipasi Masyarakat	180	27	45	41,6333	5,07805

Sumber : Data Olahan SPSS (2023).

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis statistik deskriptif untuk mengidentifikasi sebaran data skor penilaian dari 180 responden. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel dependen (Y) Akuntabilitas memiliki skor nilai antara 27-44, dengan nilai mean 36,1389 dan standar deviasi 4,43511. Variabel independen Kompetensi (X1) memiliki sebaran skor antara 10-25, dengan mean 17,7944 dan standar deviasi 1,95679. Variabel independen Komitmen Organisasi (X2) memiliki sebaran penilaian antara 11-20, dengan mean 16,722 dan standar deviasi 2,291. Sedangkan, variabel independen Partisipasi Masyarakat (X3) memiliki sebaran nilai antara 27-45, dengan mean 41,6333 dan standar deviasi 5,07805.

### Uji Asumsi Klasik

#### 1) Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengecek apakah variabel independen dan dependen dalam model regresi terdistribusi secara normal atau mendekati normal. Distribusi data yang mendekati normal diperlukan agar model regresi dapat dianggap baik. Untuk menguji normalitas, digunakan normal probability plot dan analisis statistik one-sample Kolmogorov-Smirnov test dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai K-S sebesar 0,084 dan nilai signifikansi sebesar 0,04, seperti terlihat pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
N		180
Normal Parameters <sup>a, b</sup>		
Mean		,0000000
Std. Deviation		3,86151168
Most Extreme Differences		
Absolute		,084
Positive		,052
Negative		-,084
Test Statistic		,084
Asymp. Sig. (2-tailed)		,004 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data Olahan SPSS (2023),

Hasil penelitian menjelaskan bahwa model penelitian belum memenuhi asumsi normalitas karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini diduga dapat terjadi karena pengambilan sampel hanya dilakukan pada beberapa segmen tertentu.

#### 2) Hasil Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2013). Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas, peneliti menggunakan nilai cut off dengan nilai tolerance <0,10 atau sama dengan nilai VIF >10 (Ghozali, 2013). Model yang baik adalah seharusnya tidak terjadi korelasi antara masing-masing variabel independen. Regresi bebas dari gangguan multikolinieritas apabila nilai tolerance > 0,10 atau VIF < 10.

Hasil pengujian multikolineritas terhadap data-data untuk setiap variabel dalam penelitian ini, nampak pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolineritas

Variabel	Collinerity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kompetensi	0,809	1,236
Komitmen Organisasi	0,873	1,146
Partisipasi Masyarakat	0,803	1,245

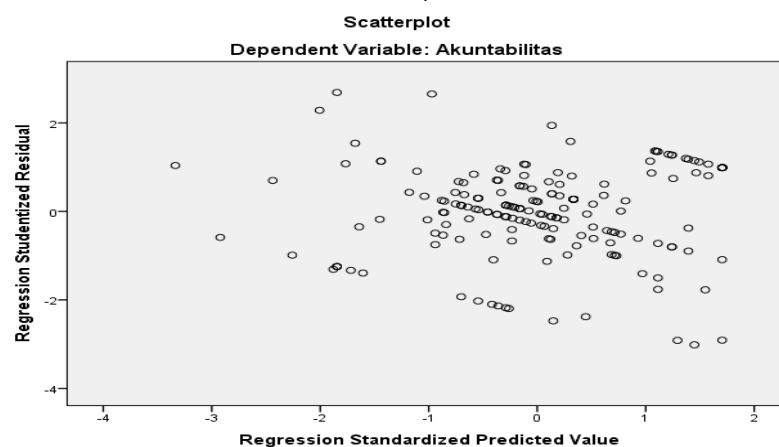
Sumber : Data Olahan SPSS (2023).

Berdasarkan hasil uji multikolineritas terhadap tiga variabel independen dalam penelitian ini, tidak terdapat korelasi antara variabel yang melebihi batas 90%, maka dapat dikatakan tidak terdapat multikolineritas yang serius. Hasil perhitungan nilai tolerance terlihat bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance  $< 0,10$ , yang artinya tidak ada korelasi antara variabel independen yang lebih dari 95%, demikian juga dengan hasil perhitungan nilai VIF, dari ketiga variabel independen yang diuji tidak ada nilai VIF yang lebih dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolineritas antara variabel independen dalam model regresi. Demikian maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini merupakan model yang baik, karena tidak ditemukan korelasi yang spesifik di antara tiga variabel independen.

### 3) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian model regresi terhadap hasil penelitian ini adalah dengan cara mengamati penyebaran grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED), dan residualnya (SRESID). Apabila ada pola tertentu, seperti menyempit yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi Heteroskedastisitas, dan jika ada pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Pada gambar berikut disajikan hasil analisis grafik scatter plot dari data yang diolah.

Gambar 1. Grafik Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Olahan SPSS (2023).

Berdasarkan grafik scartter plots diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun d ibawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Heteroskedastitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel kinerja.

### Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Kekuatan hubungan antara variabel independen ( $X_1, X_2$  dan  $X_3$ ), dengan variabel dependen ( $Y$ ), diukur dengan perhitungan koefisien determinan ( $R^2$ ) seperti disajikan dalam tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Model Summary <sup>a</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.524 <sup>a</sup>	.275	.263	3.89428	1.201

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Komitmen Organisasi, Kompetensi  
b. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber : Data Olahan SPSS (2023).

Berdasarkan hasil uji koefisien determinan pada tabel 1.5, menunjukkan tingkat pengaruh (*Adjusted R Square*) antara kompetensi, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas adalah sebesar 26,3 %, dan sisanya 73,7 % dipengaruhi oleh faktor lain diluar ketiga variabel independen dalam penelitian ini. Nilai ini masih kecil, dan menjelaskan bahwa model yang digunakan dalam penelitian masih rendah. Nilai koefesien determinasi ( $R^2$ ) dapat dikatakan baik apabila nilainya mendekati 100%.

### Hasil Pengujian Hipotesis

#### Hasil Uji Parsial (Uji t)

Analisis data tentang hubungan antara variabel – variabel independen secara parsial dengan variabel dependen, guna mengambil kesimpulan apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak, dengan menggunakan Uji Parsial (Uji t), seperti disajikan pada tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients <sup>a</sup>					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	11.963	3.251		.000
	Kompetensi	.305	.165	.131	.067
	Komitmen Organisasi	.200	.138	.099	.151
	Partisipasi Masyarakat	.370	.064	.415	.000

Sumber : Data Olahan SPSS (2023).

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan apakah variabel independen mempunyai pengaruh secara individual atau parsial terhadap variabel dependen, dimana dalam penelitian ini variabel independennya terdiri dari kompetensi, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas.

#### a. Pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas

Berdasarkan hasil pengujian statistik uji parsial (uji t) pada tabel 1.6, membuktikan bahwa hasil uji regresi di atas untuk pengaruh variabel kompetensi ( $X_1$ ), terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung ( $Y$ ), memiliki nilai t hitung yang lebih kecil dari pada nilai t tabel yaitu sebesar

$1,841 < 1.961$  dan tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05, yaitu  $0,067 > 0,05$ .

Maka disimpulkan bahwa variabel kompetensi (X1) secara parsial mempunyai pengaruh yang tidak signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung. Dengan demikian hipotesis pertama ( $H_1$ ) pada penelitian ini, yaitu :

$H_1$  : Kompetensi aparat kampung berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung, **ditolak**.

**b. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas**

Pengujian statistik uji parsial (uji t) pada tabel 1.6., membuktikan bahwa hasil uji regresi di atas untuk pengaruh variabel komitmen organisasi (X2) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung (Y), memiliki nilai t hitung yang lebih kecil dari pada nilai t tabel yaitu sebesar  $1,441 < 1.961$  dan tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05, yaitu  $1,082 > 0,151$ . Sehingga dapat disimpullkan bahwa variable komitmen organisasi (X2) secara parsial mempunyai pengaruh yang tidak signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung. Dengan demikian hipotesis kedua ( $H_2$ ) pada penelitian ini, yaitu :

$H_2$  : Komitmen organisasi pemerintah kampung berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung, **ditolak**.

**c. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas**

Hasil pengujian statistik uji parsial (uji t) pada tabel 1.6, membuktikan bahwa uji regresi variabel partisipasi masyarakat (X3) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung (Y), memiliki nilai t hitung yang lebih besar dari pada nilai t tabel yaitu sebesar  $5,791 > 1.961$  dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05, yaitu  $0,000 < 0,05$ .

Sehingga dapat disimpullkan bahwa variable partisipasi masyarakat (X3) secara parsial mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung. Dengan demikian hipotesis ketiga ( $H_3$ ) pada penelitian ini, yaitu :

$H_3$  : Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung, **diterima**.

**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

Analisis data tentang hubungan avariabel - variabel independen secara simultan atau ber sama-sana terhadap variabel dependen, guna mengambil kesimpulan apakah hipotesis keempat ( $H_4$ ) dapat diterima atau ditolak, dengan menggunakan Uji Simultan (Uji F), seperti pada tabel 1.7.

Tabel 1.7. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1012.410	3	337.470	22.253	.000 <sup>b</sup>
	Residual	2669.118	176	15.165		
	Total	3681.528	179			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Komitmen Organisasi, Kompetensi

Sumber : Data Olahan SPSS (2023).

Hasil pengujian statistik menggunakan uji simultan (uji F) pada tabel 1.7, membuktikan bahwa hasil uji regresi di atas untuk variabel independen secara keseluruhan (X1, X2 dan X3) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung (Y), memiliki nilai F hitung yang lebih besar dari pada nilai F tabel yaitu sebesar  $22,2531 > 1.961$  dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05, yaitu  $0,000 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung. Dengan demikian hipotesis keempat (H<sub>4</sub>) pada penelitian ini, yaitu :

H<sub>4</sub> : Kompetensi aparat kampung, Komitmen organisasi pemerintah kampung dan Partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana kampung, **diterima**.

### Pembahasan

Dalam penelitian ini, ditemui bahwa kompetensi aparat kampung tidak memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung di Kabupaten Waropen.

Hal ini dapat terjadi karena adanya beberapa permasalahan utama sebagaimana diungkapkan responden melalui jawaban pada kuesioner terhadap indikator variabel Kompetensi Aparat Kampung, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Latar belakang pendidikan dari aparat pemerintah kampung rata-rata masih terbatas, jika ditinjau dari tingkat pendidikan dan disiplin ilmu yang berkaitan dengan manajemen keuangan.
- Kurang adanya pelatihan tentang tata kelola keuangan bagi aparat kampung, terutama dalam hubungannya dengan pengelolaan program dana kampung.
- Kurangnya pendampingan dan pengawasan dari instansi terkait juga sebagai salah satu penyebab lemahnya kompetensi aparat kampung, khususnya pengelola keuangan kampung.

Tidak terjadinya pengaruh yang signifikan dan positif antara kompetensi aparat kampung, dengan akuntabilitas pengelolaan dana kampung dalam penelitian ini juga terjawab dengan hasil penelitian dari Khaeril Wahyu Perdana, (2018), tentang Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul, bahwa berdasarkan kuesioner yang diberikan, pertanyaan yang diajukan cenderung menilai kompetensi individu aparat pengelola dana desa, sehingga tidak mencerminkan kompetensi interaksi dengan orang lain dan kompetensi

kerja tim (*teamwork*). Oleh karena itu kompetensi aparat pengelola dana desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung**

Penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi pemerintah kampung, tidak memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung di Kabupaten Waropen.

Apabila dikaitkan dengan jawaban responden pada kuesioner terhadap indikator variabel komitmen organisasi pemerintah kampung, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan utama yang menyebabkan hal tersebut, antara lain :

- a) Kurang adanya transparansi penyelenggaraan pemerintahan kampung dalam pengelolaan keuangan kampung. Hal ini tgergambar dari jawaban responden terhadap pertanyaan pada kuesioner tentang : 'Apakah permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung juga menjadi masalah bersama bagi masyarakat di kampung, sebagian menjawab ragu-ragu dan tidak setuju dengan skor penilaian 3 dan 2 menurut skala Likert.
- b) Pada beberapa kampung, masih terjadi konflik kepentingan antara kelompok sosial masyarakat di kampung dengan aparat kampung maupun pada internal aparat pemerintah kampung, menyebabkan program yang direncanakan melalui pembiayaan dana kampung tidak berjalan secara efektif. Hal ini nampak dari jawaban responden terhadap pertanyaan tentang : 'Apakah selalu senang melaksanakan kegiatan yang diprogramkan di kampung'. Sebagian responden menjawab, ragu-ragu dan tidak setuju, dengan skor nilai 3 dan 2 menurut skala Likert.

Terkait dengan permasalahan seperti ini dalam pengelolaan dana desa, Khaerul W. Pradana (2018), mengemukakan bahwa pengelolaan dana desa memerlukan kepercayaan dan tanggungjawab yang tinggi, hal tersebut harus dimiliki oleh seluruh aparat desa dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang terdapat dalam ketentuan organisasi. Menjalankan tugas dengan baik harus didukung dengan perhatian yang baik pula dari organisasi, tugas yang terlaksana dengan baik harus diberi apresiasi dan reward untuk meningkatkan kepedulian terhadap organisasi.

### **Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung di Kabupaten Waropen. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Sarifudin Mada, Lintje Kalangi dan Hendrik Gamaliel (2017) tentang Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo, yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya Gatot Sulistioni dan Hendriadi (2004), dalam Khaeril W. Perdana (2018), mengatakan bahwa prinsip dan indikator partisipasi masyarakat dalam penganggaran, menyangkut hal-hal sebagai berikut : a) Adanya akses bagi partisipasi aktif publik



dalam proses perumusan program dan pengambilan keputusan anggaran ; b) Adanya peraturan yang memberikan tempat ruang kontrol oleh lembaga independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan sebagai media *check and balances*; c) Adanya sikap proaktif pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi warga pada proses penganggaran

### **Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung**

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparat kampung, komitmen organisasi aparat kampung dan partisipasi masyarakat, secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung di Kabupaten Waropen.

Tingkat partisipasi masyarakat secara tidak langsung telah mendorong terciptanya solidaritas dan rasa kebersamaan yang merupakan esensi dari komitmen organisasi. Selain itu partisipasi masyarakat juga turut memberikan kontribusi positif terhadap terciptanya akuntabilitas pengelolaan dana kampung, karena di dalamnya terkandung nilai transparansi, gotong royong, musyawarah dan ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini didukung oleh pendapat dari Ferina, Ika Sasti (2016), bahwa partisipasi masyarakat dalam penganggaran dan penentuan kebijakan publik sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang, serta menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan di desa;

## **SIMPULAN**

### **Kesimpulan**

Dari hasil analisis dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Kompetensi aparat kampung, yang diukur dengan indikator pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*skill*) dan sikap (*attitude*), tidak memberi pengaruh secara signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung;
- 2) Komitmen organisasi pemerintah kampung, yang diukur dengan indikator nilai sikap atau pandangan (*affective*), keberlanjutan (*continuance*) dan kebiasaan atau norma (*normative*), tidak memberi pengaruh secara signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung;
- 3) Partisipasi masyarakat yang diukur dengan indikator keterlibatan dalam pengambilan keputusan, keterlibatan dalam perencanaan dan penganggaran, keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan, serta keterlibatan dalam pengawasan anggaran, ternyata berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung;
- 4) Kompetensi, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat, secara bersama-sama, akan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung;
- 5) Partisipasi masyarakat memberikan kontribusi positif terhadap terciptanya akuntabilitas pengelolaan dana kampung, karena di dalamnya terkandung

nilai transparansi, gotong royong, musyawarah dan ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.

### Saran

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian ini, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :

- 1) Dari jawaban responden terhadap pertanyaan yang terkait dengan pengaruh kompetensi aparat kampung terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung, diketahui bahwa pelatihan dan pendampingan tentang pengelolaan dana kampung jarang dilakukan, dan juga terbatas pada aparat kampung tertentu, karena itu disarankan kepada Pemerintah Daerah, agar dapat meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah kampung dan staf pengelola keuangan kampung melalui pelatihan dan bimbingan teknis serta penyediaan sarana penunjang yang memadai secara berkelanjutan, sebagai upaya penguatan kapasitas pengelolaan keuangan di kampung secara mandiri.
- 2) Pemerintah Daerah agar mempertimbangkan untuk merekrut serta menempatkan tenaga pendamping yang memiliki latar belakang pengetahuan dan manajerial yang baik pada setiap distrik, guna mengarahkan pengelolaan dana desa secara lebih efektif, efisien dan ekonomis.
- 3) Dari hasil penelitian ini, juga diketahui bahwa variabel Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung di Kabupaten Waropen. Karena itu disarankan untuk melakukan penelitian tentang Tingkat Efisiensi, Efektivitas dan Ekonomis Pengelolaan Dana Kampung, untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penggunaan dana tersebut terhadap kehidupan masyarakat di kampung.
- 4) Kepada Pemerintah Daerah disarankan agar terus meningkatkan pola-pola pembinaan partisipatif bagi masyarakat di kampung-kampung demi menciptakan iklim kebersamaan, transparansi dan kemandirian yang semakin baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Misbahul dan Bambang Jatmiko. 2012. *Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Transparan dan Akuntabel (Survey pada Perangkat Desa di Kecamatan Ngalik, Sleman, Yogyakarta)*. Jurnal Akmenika. Vol.11.
- Arifiyanto, Dwi Febri., dan Kurrohman, Taufik. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Vol.2, No.3.
- Brown, L David., dan Moore, Mark H. 2001. *Accountability, Strategy, and International Non-Governmental Organizations*. The Houser Center for Nonprofit Organizations The Kennedy School of Government Harvard University. Working Paper No.7.
- Devas, Nick., dan Grant, Ursula. 2003. *Local Government Decision Making-Citizen Participation and Local Accountability: Some Evidence From Kenya and Uganda*. Public Administration and Developmen. Vol.23.

- Dewi, Retno Astuti. 2016. *Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Pasca Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*. Jurnal. Akuntansi Aktual. Vol.3, No. 6.
- Fajri, Rahmi. 2015. *Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol.3, No.7.
- Ferina, Ika Sasti. 2016. *Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Hir)*. Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya. Vol.14, No.3.
- Khaeril Wahyu Perdana, 2018, *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul*. Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Karimah, Faizatul. 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. 2. No. 4.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2015. *Indeks Desa Membangun 2015*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 1 dan Transmigrasi.
- Kementerian Keuangan 2016. *Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017*. Disampaikan pada Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa TA 2017, Redtop Hotel and Convention Center. 21-24 November 2016.
- Mada, Syarifudin, dkk, 2017, *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo; Manado; Jurnal Penelitian Akuntansi Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi*.
- Mahmudi, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan pertama. Yogyakarta: UII Press.
- Nadir, Sakinah. 2013. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Politik Profetik. Vol.1, No.1.
- Nainggolan H, Etmin, 2015. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008 - 2012*; Tesis Magister Akuntansi; Jayapura. Universitas Cenderawasih.
- Saifudin, (2012). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2010)*. VR Furi - Jurnal Akuntansi.
- Spencer, M.L. & Spencer, M.S. (1993). *Competence at work models for superior performance*. John Willy & Son: New York, USA.
- Sujarweni, Wiratna, 2015, *Akuntansi Desa. Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*; Yogyakarta; Pustaka Baru Press.
- Wiyakti, Daru, 2008; *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan*; Semarang; Jurnal Penelitian Tesis; Universitas Diponegoro.